

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- Amsari, Feri. *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan MK*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.
- Amsari, Feri. *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi NKRI Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Pers, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Pers, 2006.
- Az, Lukman Santoso. *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*. Ponorogo: IAIN Po PRESS, 2016.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Garner, Bryan A. dan Henry Campbell Black. *Black's Law Dictionary*. Minnesota: West Group, 2004.
- Goldsworthy, Jeffrey. *Judicial Power, Democracy and Legal Positivism*. England: Dartmouth Publishing, 2000.
- Hadjar, A. Fickar. *Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: KRHN dan Kemitraan, 2003.
- Hariyono, dkk. *Membangun Negara Hukum yang Bermartabar*. Malang: Setara Press, 2013.
- Holland, Kenneth M. *Judicial Activism in Comparative Perspective*. London: Palgrave Macmillan, 1991.
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

- Levy, Leonard W. *Judicial Review (Sejarah Kelahiran, Wewenang, dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi)*. Terjemahan oleh Eni Purwaningsih. New York: Harper Torehbooks The Academy Library, Harper, & Row, 1967.
- M.D., Moh. Mahfud. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia (Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan)*. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Manan, Munafrizal. *Penemuan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Martitah. *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Postive Legislature?*. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- MD., Moh. Mahfud. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 2007.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Kekuasaan Kehakiman (Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism Vs Judicial Restaint)*. Depok: Rajawali Pers, 2021).
- Soemantri, Sri. *Hak Uji Material di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1997).
- Sumadi, Ahmad Fadlil, dkk. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Perkembangan dalam Praktik*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Suryawati, Nany. *Hak Asasi Politik Perempuan*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2020.
- Taufiq, Muhammad. *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Thalib, Abdul Rasyid. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Terjemahan oleh Moh. Saleh Djindang*. Jakarta: Ichtiar, 1962.
- Wicaksono, Dian Agung, Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, dan Faiz Rahman. *Hubungan Personalitas Hakim Konstitusi terhadap Praktik Judicial Activism di Mahkamah Konstitusi (Studi terhadap Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi 2003 – 2017)*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2018.

Jurnal

- Asy'ari, Syukri, dkk. "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003 – 2012)". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 10. No. 4. Desember 2013.
- Faiz, Pan Mohamad. "Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 13. No. 2. Juni 2016.
- Harianto, Khairuddin Wahid, dan Etry Mike. "Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perkara Bersifat Ultra Petita Perspektif Siyasah Syar'iyah". *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. Vol. 4. No. 2. 2019.
- Idris, Munawara dan Kusnadi Umar. "Dinamika Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perkara Judicial Review". *Jurnal Siyasatuna*. Vol. 1. No. 2. Mei 2020.
- Kapitan, Rian Van Frits. "Kekuatan Mengikat Putusan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi terhadap Mahkamah Agung". *Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 44. No. 4. Oktober 2015.
- Kmiec, Keenan D. "The Origin and Current Meanings of 'Judicial Activism'". *California Law Review*. Vol. 92. No. 5. Oktober 2004.
- Lailam, Iwan Satriawan dan Tanto. "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 16. No. 3. September 2019.
- Marbun, S.F. "Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 4. No. 9. Desember 2016.
- Noviati, Cora Elly. "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 10. No. 2. Juni 2013.
- Nurhayati, Syara. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislature Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *JOM Fakultas Hukum*. Vol. 2. No. 2. Oktober 2015.
- Pandey, Shyam Prakash. "Understanding Judicial Activism and Its Impact". *GLS Law Journal*. Vol. 4. No. 2. Juli – Desember 2022.
- Pigome, Martha. "Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi Dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 11 No. 2. Mei 2011.
- Prabowo, Bagus Surya. "Menggagas Judicial Activism dalam Putusan Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 19. No. 1. Maret 2022.

- Pusat Studi Konstitusi FH Andalas. “Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 7. No. 6. Desember 2010.
- Ridlwani, Zulkarnain. “Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*”. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 5. No. 2. Agustus 2012.
- Rubaie, Ach., dkk. “Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 11. No. 1. Maret 2014.
- Rubaie, Achmad. “Dilematis Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Putusan”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2. No. 2. Desember 2018.
- Sidi, Redyanto, dkk. “Staatsfundamentalnorm (Pancasila) Sebagai Bahan Pembaruan Sistem Hukum Di Indonesia”. *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*. Vol. 2. No. 3. Oktober 2021.
- Subiyanto, Achmad Edi. “Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 9. No. 4. Desember 2012.
- Sukma, Gardha Galang Mantara. “*Open Legal Policy* Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017)”. *Jurnal Lex Renaissance*. Vol. 1. No. 5. Januari 2020.
- Sutiyoso, Bambang. “Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Indonesia”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 7. No. 6. Desember 2010.
- Tulaseket, Revivo. “Praktik Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”. *Jurnal Lex Administratum*. Vol. 8. No. 3. Juli – September 2020.
- Wibowo, Mardian. “Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 12. No. 2. Juni 2015.
- Wijaya, Made Hendra. “Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila”. *Jurnal Advokasi*. Vol. 5. No. 2. Mei 2015.
- Yasin, Ikhsan Fatah. “Keadilan Substantif dalam Ultra Petita Putusan Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Justitia Islamica*. Vol. 15. No. 1, Juni 2018.
- Yuliono, Anton. “Kepercayaan Masyarakat Pada Partai Politik”. *DIA Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 11. No. 1. Juni 2013.
- Yusdiyanto. “Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke-empat Pancasila dalam Sistem Demokrasi di Indonesia”. *Fiat Justitia Journal of Law*. Vol. 10. No. 2. April - Juni 2015.

Majalah, Makalah, dan Laporan Penelitian

Asshiddiqie, Jimly. “Gagasan Negara Hukum Indonesia”. *Majalah Hukum Nasional* Nomor 1 – 2012.

Saha, Arpita. *Judicial Activism in India: A Necessary Evil*. National Law University Jodhpur. India: 8 Juli 2008.

Wicaksono, Dian Agung, dkk. “Hubungan Personalitas Hakim Konstitusi terhadap Praktik *Judicial Activism* di Mahkamah Konstitusi (Studi terhadap Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi 2003 – 2017)”. *Laporan Penelitian Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi*. Oktober 2018.

Skripsi

Saraswati, Mega Puspita. “Implikasi Judicial Activism Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Sistem Kekuasaan Kehakiman (Putusan Mahkamah Konstitusi Periode Tahun 2012 – 2016)”. *Skripsi Sarjana*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021.

Internet

Mahkamah Konstitusi Indonesia. Advokat Pelajari Pentingnya Pengujian Undang-Undang. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16309>. Diakses pada tanggal 4 Desember 2022.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Menabrak Rambu-Rambu Demi Keadilan Substantif. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=4719>. Diakses pada tanggal 5 Februari 2023.

Pengadilan Agama Purwodadi. *Judicial Activism* dalam Putusan Hakim. <http://www.pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/357-judicial-activism-dalam-putusan-hakim>. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2022.

Wawancara

Irfan Nur Rachman. *Wawancara*. Peneliti Ahli pada Hakim Konstitusi. Tanggal 23 Februari 2023. Pukul 09.30 WIB.

Focus Group Discussion

Ardilafiza. “*Perkembangan Putusan Hakim dalam Hukum Acara MK Pasca Perubahan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi*”. Pemantik. Disampaikan dalam FGD APHAMK (Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi) pada 11 Februari 2023.